



Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia (2014-2018)

Irayomi F. Maha

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2014, for the first time Sweden declared itself a country with a feminist foreign policy. The statement that drew international attention and attention was delivered by the Swedish foreign minister, Margot Wallström, who is an activist for women and gender equality. In implementing this policy, there are six external policies carried out by Sweden which are implemented by the Swedish foreign ministry and the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). The six policies include; fulfillment of human rights, freedom from acts of physical, mental and sexual violence, participation of women in preventing and resolving conflicts in the pre and post-conflict period, participation in elections, fulfillment of economic and development rights and finally the right to reproduce and sexually healthy. can analyze Sweden's reasons for implementing these six policies. The unit of analysis in foreign policy consisting of individuals, countries and the international system is used. This research is an explanative research type and qualitative research type with literature research data collection techniques and uses congruent methods to analyze data. The results of this study indicate that the three unit level analyzes, both individual, state and international system, encourage the formation of feminist foreign policy from Sweden

Keywords: *Feminist foreign policy, Sweden, SIDA, Individual, State , International System.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, setelah pemilu, untuk pertama kalinya Pemerintah Swedia merumuskan kebijakan luar negeri feminis yang mengejutkan dunia internasional dengan klaim tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2015 pemerintah Swedia menyatakan klaim bahwa Swedia adalah Pemerintahan Feminis pertama di dunia (Aggestam, 2016). Sebelumnya, Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia tidak melibatkan Feminisme dan berfokus pada demokrasi dan kooperasi dalam bidang keamanan. Dalam masa kepemimpinan Carl Bildt sebagai Menteri Luar Negeri Swedia terdahulu, Carl Bildt aktif dalam advokasi terkait demokrasi dan ekspansi Uni Eropa yang lebih terbuka dan demokratis. Tindakan dan komitmen Bildt dalam promosi nilai demokrasi, dibuktikan dengan dukungan beliau terhadap ekspansi Uni Eropa bagian tenggara hingga ke Turki. Hal ini tercermin dalam pidato Bildt yang berisikan dorongan untuk Uni Eropa menjadi lebih kuat dan relevan serta menyesuaikan diri dengan masyarakat global (Carl Bildt, 2009).

Selain itu, tindakan promosi terhadap demokrasi yang dilakukan Bildt lainnya ialah semasa kepemimpinannya dalam kementerian luar negeri, Bildt sering berkunjung ke Ukraina untuk melakukan konferensi pers dalam hal demokrasi dan penyelenggaraan pemilu dan parlementer yang adil (Freedom House, 2014).

Setelah masa kepemimpinan Bildt, tongkat estafet kepemimpinan politik luar negeri Swedia dikomandoi oleh Margot Wallström sebagai menteri luar negeri Swedia. Beliau merupakan seorang aktivis kesetaraan dan keadilan gender dan sering menyuarakan tindak anti kekerasan seksual untuk PBB (Aggestam, 2019). Dengan terpilihnya Wallström, kebijakan luar negeri Feminis kemudian diluncurkan. Klaim terhadap kebijakan luar negeri Feminis ini muncul pada saat koalisi Partai Sosial Demokrat (*Social Democratic Party*) dan Partai Hijau (*Green Party*) memenangkan koalisi pemerintahan pada tahun 2015. Dalam kebijakan luar negeri Feminisme yang diadopsi, Margot Wallström mengemukakan bahwa kebijakan Feminis ini berpegang pada prinsip dasar yakni kesetaraan dan penyertaan wanita yang sering kali secara sistematis diabaikan keberadaannya. Terdapat tiga pilar yang menjadi fokus utama Margot Wallström yakni; hak (*Rights*), representasi (*Representation*) dan sumber daya (*Resources*). Pilar yang pertama hak (*Rights*) merujuk pada kaum perempuan yang memiliki hak dalam advokasi dan promosi serta perlindungan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam bernegara. Selanjutnya, Representasi (*Representation*) yang berarti partisipasi dan representasi wanita serta pengaruhnya dalam perumusan dan pembuatan kebijakan dalam semua level bidang, terutama terkait dengan proses perdamaian. Yang terakhir sumber daya (*Resources*) berfokus pada keadilan dan pemerataan distribusi terkait sumber daya baik secara pendapatan, dan sumber daya alam dan bentuk dari aktualisasi dari penerapan HAM yang adil untuk semua kalangan (Poblete, 2018).

Dengan dirumuskannya kebijakan ini, Pemerintah Swedia menunjukkan komitmen terhadap penerapan kebijakan ini yakni melalui Kementerian Luar Negeri Swedia dan SIDA (*Swedish International Development Cooperation Agency*) yang merupakan badan yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam penerapan visi dan misi kebijakan Feminis. Komitmen pelaksanaan Swedia dalam kebijakan ini antara lain SIDA pada tahun 2014, menargetkan peningkatan kesehatan reproduksi dan hak kaum LGBT di Afrika terkhusus bagian selatan Sahara. Selain itu, SIDA mengadvokasi dan mendukung masyarakat Selatan Sudan dalam proses perdamaian yang dimana dukungan tersebut melibatkan suara wanita dalam proses perdamaian. Pada tahun 2009-2013 SIDA telah berkontribusi untuk 22 negara dalam mempromosikan kesetaraan gender dimana 8,3 juta wanita yang diberi bantuan akses pendidikan, satu juta wanita mendapatkan bantuan akses finansial dan 1500 organisasi Pernyataan yang diutarakan Margot Wallström pada tahun 2015 tentang Kebijakan Luar Negeri Feminis dalam Deklarasi Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Affair Declaration*) menjadi awal terbentuknya gagasan kebijakan ini (Sörbom, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Swedia dalam merumuskan kebijakan luar negeri feminis. Mengingat dengan besarnya komitmen yang telah direalisasikan Swedia baik dari sisi citra internasional maupun finansial Swedia sebagai negara. Adapun hipotesis penelitian ini bahwa rumusan Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia didorong oleh para aktor seperti menteri luar negeri Swedia, kemudian pemerintahan Swedia dan organisasi internasional yang dimana Swedia merupakan bagian dari keanggotaan organisasi tersebut. Masing-masing aktor memiliki pengaruh serta peran dalam pembentukan kebijakan. Dengan peran dari masing-masing

aktor maka diwujudkan dalam enam kebijakan eksternal (kebijakan luar negeri) pemerintah Swedia.

PEMBAHASAN

Sebelum menelaah aktor yang berperan dalam mendorong diputuskannya kebijakan luar negeri feminis Swedia, pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana komitmen Swedia dalam menerapkan enam kebijakan eksternal yang mereka terapkan. Kemudian, dengan menggunakan konsep level analisis (Rourke, 2007) yang berargumen bahwa untuk dapat memahami negara dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan luar negeri, maka dengan membagi tiga unit level analisis yakni level analisis individu, negara dan sistem (internasional) akan didapati alasan utama negara dalam memutuskan kebijakan terkhusus kebijakan luar negeri yang layak. Penelitian ini akan menelaah tiga unit level analisis yakni individu, yang membahas mengenai pemimpin negara sebagai aktor pembuat kebijakan, kemudian negara dan sistem pemerintahan yang berlaku serta sistem yang merupakan faktor eksternal yaitu organisasi internasional yang mendorong negara dalam merumuskan kebijakan.

Enam Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia

Pada poin pertama penerapan kebijakan feminisme yakni pemenuhan terhadap HAM mengharuskan negara ini untuk menerapkan kebijakannya diluar daripada teritori wilayahnya. Pertama, dalam asas pemenuhan terhadap HAM, Swedia telah melakukan upaya seperti upaya diplomasi dalam *UN General Assembly* dan *UN Human Rights Council* dalam upaya peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender dalam aspek internasional. Swedia juga telah mendorong *UN Human rights Council* untuk melakukan upaya dalam inklusi dan perbaikan kesehatan reproduksi dan seksual serta pemberantasan pernikahan anak dan mendorong *UN Human Rights Council* untuk mengadopsi resolusi perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Kemudian pada poin kedua kebijakan eksternal Swedia yakni, Bebas dari Tindak Kekerasan Fisik, Mental dan Kekerasan Seksual (*Free From Psychological and Sexual Violence*) Dalam poin ini, Swedia telah melakukan promosi terhadap pentingnya isu ini dalam Dewan Keamanan PBB. Swedia telah membantu dalam membuat kriteria sanksi rezim dan menambahkan kekerasan seksual dan gender sebagai salah satu indikatornya. Bersama dengan *UN Secretary General* membuat *action plan* untuk mencegah kekerasan ekstrimisme yang dapat membahayakan perempuan dan anak-anak dalam membahas *UN Global Counter-Terrorism Strategy*. Kemudian Swedia bekerja sama dengan *International Criminal Court (ICC)* sebagai prosekutor dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan sejalan dengan ini, Swedia dan Botswana bertanggung jawab dalam memfasilitasi investigasi mengenai kejahatan berbasis kekerasan seksual dibawah naungan piagam ICC (Sweden Ministry of Foreign Affair, 2017)

Kemudian pada poin ketiga yaitu Partisipasi Wanita dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik dalam Masa Sebelum dan Sesudah Konflik (*Participation in Preventing and Resolving Conflict and Post Conflict Building*) Dalam isu ini, Swedia telah membentuk rencana nasional baru untuk implementasi yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya terkait perempuan, perdamaian dan keamanan (*women, peace, and security*). Rencana ini akan ditujukan untuk kementerian dan badan pemerintah serta kedutaan dan mendorong Swedia dalam membangun dialog internasional dengan lima negara berkonflik dan negara paska konflik. Kemudian, Swedia juga mendirikan jaringan untuk dialog yang mendukung partisipasi wanita dalam membangun perdamaian di negara-negara nordik. Selanjutnya, Swedia juga mendorong

pembentukan jaringan yang sama dalam area Mediterania dan Uni Afrika (Sweden Ministry of Foreign Affair, 2017). Selanjutnya dalam poin keempat yakni Partisipasi dalam Pemilu (*Political Participation and Influence of Women and Girls in All Areas of Society*) Dalam hal mendukung wanita dalam partisipasi politiknya, Swedia telah mengadvokasikan kebebasan berpendapat dengan memperkuat jurnalis wanita, para aktivis HAM dan para aktivis lingkungan, politisi serta pekerja budaya. Upaya ini telah menghasilkan Swedia sebagai pelopor dalam Seminar *Sweden's Freedom of the Press Act* yang ke 250. Selain itu Swedia juga mendorong implementasi Uni Eropa yang tertuang dalam *EU Action Plan on Human Rights and Democracy* pada tahun 2015-2019 (Sweden Ministry of Foreign Affair, 2017).

Pada poin kelima kebijakan eksternal Swedia yakni, Pemenuhan terhadap Hak Ekonomi dan Pembangunan (*Economic Rights and Empowerment*) Swedia turut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran terkait kesetaraan gender dalam *Fifth Global Review of Aid for Trade* dimana langkah lebih jauhnya Swedia juga memberikan sokongan finansial dalam *United Nations Conference on Trade and Development* dalam memberikan indikator penilaian dan pengukuran terhadap perdagangan yang tidak bias gender (Sweden Ministry of Foreign Affair, 2017). Terakhir yakni Hak Reproduksi dan Seksual yang Sehat (*Sexual and Reproductive Health and Rights*) dimana Swedia mengkoordinasikan Konferensi “*She Decides*” yang diadakan di Brussel pada Maret 2017 bersama dengan Belgia, Belanda dan Denmark. Konferensi ini merupakan bagian dari upaya untuk mobilisasi terhadap dukungan finansial dan politik terkait isu kesehatan dan reproduksi seksual dalam ranah internasional. Dalam konferensi tersebut, Swedia juga berkomitmen dalam memberikan sokongan dana sebesar 200 Juta SEK untuk upaya peningkatan hak dan kesehatan reproduksi seksual (SRHR). Kemudian, Swedia juga gencar dalam mengirim surat kepada UNDP, UNFPA, UNICEF dan *UN Women* untuk mempertimbangkan rencana strategis Swedia untuk diterapkan dalam jangka waktu 2018-2021 mengenai isu hak dan kesehatan reproduksi seksual (Sweden Ministry of Foreign Affair, 2017).

Unit Level Analysis Individu

Kebijakan merupakan produk putusan yang dibuat bukan hanya berdasarkan konstitusi dan ideologi negara. Pemimpin merupakan aktor yang berpengaruh dalam perumusan hingga putusan pembuatan kebijakan. Menurut (Rourke, 2007) faktor biologis dan jejak historis karir manusia (pemimpin) dapat memengaruhi kebijakan yang akan diambil dan diterapkan di sebuah negara. Yang pertama ialah faktor biologis dalam level analisis individu (Rourke, 2007). berpendapat bahwa faktor biologis mempunyai pengaruh dalam mendorong manusia dalam membuat kebijakan. Faktor biologis juga menjelaskan bahwa perilaku dan sikap manusia merupakan bentuk dari insting makhluk hidupnya dalam bertahan hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan intelektual yang ia miliki. Biopolitik merupakan cabang ilmu yang mengkaji mengenai kaitan antara sifat alamiah manusia dengan perilaku politiknya. Rourke memberi contoh yakni pada tahun 2003 saat invasi Amerika Serikat terhadap Irak, dua pertiga dari keseluruhan populasi laki-laki mendukung invasi sementara setengah populasi perempuan Amerika menolak terjadinya perang. Sama halnya dengan Margot Wallström sebagai Menteri Luar Negeri Swedia (2014-2018) yang merupakan seorang perempuan, beliau turut bertanggung jawab dalam mendorong dan merumuskan kebijakan luar negeri Swedia. Faktor biologis gender beliau sebagai seorang perempuan yang merupakan seorang penyintas dari tindak kekerasan seksual memori pahit tersebut beliau memulai karirnya sebagai anggota parlemen Swedia (The New York Times, 2017). Setelah mengalami keadaan pahit tersebut beliau terdorong untuk mewujudkan keadilan yakni dengan membentuk kebijakan luar negeri feminis. Terhitung sejak

beliau menjabat, penerapan kebijakan feminis yang dimulai dengan berbagai macam tindakan oleh beliau sebagai individu. Sesaat setelah dilantik, Wallström menekankan bahwa hak perempuan ialah bagian dari hak asasi manusia (Poblete, 2018).

Kemudian faktor kedua menurut Rourke (2007) bahwa para pemimpin terpengaruh dalam membuat kebijakan berdasarkan pengalaman politis yang ia alami. Rourke menganalogikan bagaimana Presiden Amerika Serikat George Bush memiliki sentimen tertentu terhadap kasus ayahnya, dengan Irak sehingga menimbulkan dorongan beliau untuk mewujudkan mimpi ayahnya dalam menaklukkan Irak. Sama halnya dengan Bush, sebagai seorang menteri luar negeri, Margot Wallström yang biarpun merupakan seorang dari latar belakang biasa memiliki ambisi dan pengalaman serta sejarah yang mendorong beliau dalam merumuskan kebijakan luar negeri feminis.

Bagian ini akan menyoroti jenjang dan tahapan karir beliau sebelum menjabat menjadi menteri luar negeri. Margot Elisabeth Wallström lahir pada 28 September 1954 di Skellefteå, Swedia. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Wallström mengawali karirnya dengan bekerja sebagai pegawai bank dan kemudian melanjutkan karir sebagai seorang akuntan (AWPC, 2015). Kemudian, pada tahun 1973 Wallström melanjutkan karirnya di kantor Ombudsman Swedia. Selanjutnya, pada tahun 1979, Wallström terpilih sebagai anggota parlemen dan menjabat selama enam tahun. Pada tahun 1988 hingga 1998 beliau menjajaki karir dengan posisi penting sebagai menteri dimana pada tahun 1988-1991 beliau menjabat sebagai Menteri Pemuda, perizinan lokal dan Perlindungan Konsumen. Kemudian menyusul pada tahun 1994-1996 menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, lanjut pada tahun 1996-1998 menjabat sebagai Menteri Sosial.

Setelah menjabat menjadi menteri sosial, beliau kemudian beralih karir menjadi Wakil Eksekutif Presiden untuk *World View Global Media* dari tahun 1999-2004 hingga akhirnya kembali lagi dalam ranah politik dengan menjadi Komisioner Uni Eropa untuk Strategi Komunikasi dan Jaringan institusi. Tak berhenti sampai disitu, tahun 2007 Wallström menjadi salah satu pimpinan *Ministerial Initiative of the Council for Women World Leaders* (Inisiasi Kementerian terhadap Dewan Pimpinan Wanita Dunia). Selanjutnya disusul pada tahun 2010 mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Mon menunjuk beliau sebagai Wakil Representasi Khusus dalam penanganan kekerasan seksual dan konflik PBB (Council of Women World Leaders, 2014). Dengan jenjang dan rentetan karir beliau sebagai pemimpin wanita dan rekam jejak politisnya, maka hal tersebut mendukung gagasan Rourke mengenai sejarah karir dalam politik menentukan pemimpin dalam membuat kebijakan. Dapat dilihat dengan jelas jenjang karir Wallström sebagai pemimpin wanita yang tidak pernah lepas dari isu-isu kesetaraan gender semasa kepemimpinannya.

Setelah melalui beberapa tahapan dalam jenjang karir dalam politik, pada 3 Oktober 2014 Wallström dipilih menjadi Menteri Luar Negeri Swedia. Menduduki jabatan sebagai seorang Menteri Luar Negeri Swedia dalam mencapai visi feminisme dalam kebijakan luar negeri dapat dilihat dalam berbagai tindakan yakni diplomasi maupun implementasi dalam kebijakan. Dalam ranah diplomasi baik diplomasi langsung maupun digital. Dukungan beliau dalam diplomasi digital pada gerakan kampanye *#metoo*. Gerakan kampanye digital dengan tagar *#metoo* merupakan slogan yang viral di media sosial pada tahun 2017 oleh seorang aktris Amerika Serikat. Gerakan kampanye ini berisi tentang kesaksian dan cerita para korban kekerasan seksual dan diangkat di media sosial sebagai bentuk perlawanan dan upaya para korban terhadap geringnya penanganan terhadap isu ini. Dengan kecanggihan teknologi masa kini, gerakan ini

pun dilakukan di Swedia yang dimulai oleh perempuan berusia 27 tahun Felicia Witenberg (Uimonen, 2019).

Gerakan kampanye ini kemudian viral hingga di Stockholm Swedia, kampanye dan demonstrasi gerakan *#metoo* diikuti oleh sekitar 3000 orang (Uimonen, 2019). Dengan masifnya perhatian terhadap gerakan ini, Margot Wallström pun ikut dalam mendukung gerakan ini dan bercerita mengenai bagaimana pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan diperlukan adanya pembentukan peraturan yang menjamin agar hak-hak para korban terakomodasi. Bahkan beliau sendiri mengungkapkan bagaimana kasus pelecehan seksual yang dialaminya pada saat menghadiri pertemuan dengan delegasi dan pimpinan Uni Eropa. Beliau mengemukakan bahwa bila perempuan bergerak dan berani berbicara mengenai tindak kekerasan dan pelecehan yang dialami, beserta dengan tuntutan untuk kepastian hukum maka kampanye dan gerakan ini akan mampu mengubah sejarah (Sverigeradio, 2017).

Selain dukungan dalam diplomasi digital, dalam diplomasi langsung sebagai seorang diplomat, sejak menduduki jabatan sebagai menteri luar negeri dalam setiap forum dan diskusi beliau selalu menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perdamaian yang merupakan bagian penting dari feminisme. Pidato beliau dalam forum *#femdefenders* pada 28 November 2014, dalam acara itu beliau menekankan bagaimana kebijakan luar negeri feminis merupakan bagian dari ambisi beliau untuk mengentaskan kesenjangan gender dan diskriminasi yang terstruktur. Dengan melindungi hak-hak perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian, untuk dapat menegakkannya semua pihak (negara) dimana negara harus berperan dalam menghapus segala bentuk diskriminasi gender seperti pernikahan paksa dan mutilasi genital (Wallström, 2015). Pernyataan dukungan lain dalam pidato beliau pada 30 Januari 2015, di sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Perlindungan warga dalam masa konflik bersenjata. Beliau menyatakan bahwa bagaimana perempuan terkhusus anak perempuan remaja dirugikan dan berada dalam keadaan rentan pada masa konflik bersenjata, ketidaksetaraan gender dan kesenjangan keadilan untuk hak-hak perempuan menjadi isu utama dalam hal ini. Dalam pidatonya, Wallström menekankan bahwa perempuan merupakan agen perubahan yang harus di perhitungkan keberadaannya untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan merupakan salah satu perwujudan cita-cita *Women, Peace and Security Agenda*. Sebagai kesimpulan, dalam konferensi tersebut beliau menekankan bahwa inklusi perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan merupakan poin penting dalam membentuk progres yang nyata dalam mewujudkan perdamaian dan perubahan (Wallström, 2015). Pernyataan Wallström ini juga didukung dengan pidato di Universitas IHEC Tunisia yang diselenggarakan oleh *UN Office of Human Rights* tentang peningkatan kasus kekerasan seksual yakni,

I am here today to talk to you about why Sweden actively pursues a feminist foreign policy... aims at ensuring women's rights and participation in central decision-making processes. Gender equality is not just the right thing to do.....increasing gender equality has a positive impact on food security, extremism, health, education and various other key global concerns.

Dalam pernyataan tersebut beliau menjelaskan bagaimana pentingnya kebijakan luar negeri feminis dalam memastikan hak kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan maupun kebijakan domestik negara melibatkan kesetaraan gender dikarenakan kesetaraan gender perlu dalam keadaan dunia yang dinamis agar dapat mencapai keamanan dan keadilan dan menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu global seperti ekstrimisme,

kesehatan, kesenjangan pendidikan dan isu-isu global lain (Wallström, 2016). Dengan demikian dalam unit level analisis ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Swedia yang dipelopori oleh Wallström sebagai seorang wanita yang akan cenderung memilih kebijakan yang tidak agresif dan cenderung mengambil sikap kolaboratif dalam melakukan perundingan maupun penyampaian tujuan. Dikarenakan nilai-nilai yang dikandung dalam ranah feminisme berhubungan dengan kesetaraan dan inklusif maka hal tersebut nampak pada usaha Wallström dalam upaya memberikan perlindungan dan perdamaian. Sejalan dengan pendapat Rourke yang menyatakan bahwa setiap manusia sejatinya dapat berperilaku agresif dan kasar namun, hal tersebut dapat ditemukan dalam porsi yang berbeda-beda. Namun perilaku agresif dan kasar tersebut hanya memiliki satu tujuan akhir yakni perlindungan yang dalam hal ini perlindungan bagi negara untuk melindungi warga negara dan berusaha untuk mencapai keadilan menuju perdamaian.

Unit Level Analisis Negara

Dalam memahami kebijakan luar negeri, pembahasan lebih detail mengenai negara yang dimaksudkan tidak hanya bagi pemerintahan yang berkuasa namun juga membahas kultur politik di negara tersebut. Terdapat dua bagian dalam menganalisis level negara, yakni; situasi politik negara (kultur politik) dan lembaga yang memengaruhi pembuatan kebijakan (Rourke, 2007). Pada aspek pertama yakni kultur politik dimana menurut Rourke setiap negara cenderung memiliki kultur politik yakni sebuah konsep tradisional atau norma yang menjadi basis praktik bernegara. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan pembuatan keputusan oleh para pemimpin negara. Para pemimpin cenderung mengacu pada nilai dan kultur yang dianut negara, walaupun terkadang para pemimpin tersebut tidak memiliki banyak kesamaan nilai dengan kultur politik negara, tetap saja para pemimpin negara harus selalu mengacu pada kultur politik negara. Sebagai negara monarki, Swedia sangat dipengaruhi oleh Luteranisme dan nilai keagamaan katolik memegang peranan penting dalam pembentukan hukum dan asas kenegaraan di Swedia. Hukum dan negara pada masa abad 18 di Swedia sangat mengacu pada kekuasaan monarki dan gereja dan pada masa ini konformitas dan kesamaan serta persetujuan pendapat, universalisme dan sikap egaliter telah diterapkan dengan baik oleh negara dan didukung oleh gereja. Terdapat dua prinsip yang melambangkan konsep kebudayaan bernegara Swedia yakni *lagom* dan *Jante Law*. *Lagom* yang berarti kesederhanaan dan merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat Swedia. Sementara, *Jante Law* adalah sebuah kritik oleh Axel Sandemose yang menyatakan bahwa konformitas telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Swedia dan terbiasa akan hal tersebut. secara umum, etika Luteran berhubungan langsung dengan budaya Swedia yakni menjunjung tinggi harga diri dan kebebasan individu misalnya saja seseorang dapat menjadi perdana menteri walaupun ia bersal dari kalangan rakyat biasa namun harus memenuhi kriteria seperti pendidikan dan karakter yang baik. Keadaan tersebut akan mendorong terciptanya kultur sosial-demokrat Swedia (Noel, 2013).

Terakhir, pada aspek mengenai lembaga dan institusi Swedia dalam pembuatan kebijakan. Terdapat tiga aspek yang perlu diketahui dalam menganalisis institusi Swedia. Pertama, institusi di Swedia ialah institusi yang inklusif dan adil hal ini tidak saja nampak sebagai bias melainkan terbukti dengan keadaan negara dengan akses pendidikan yang baik dan gratis, partisipasi wanita dalam politik dan pajak yang adil serta keadaan ketenagakerjaan yang baik terkhusus untuk wanita. Kedua, dalam memahami institusi di Swedia, bahwa setiap insitusi di Swedia memiliki orientasi yang merujuk pada dunia internasional, misalnya saja 50% GDP yang dimiliki Swedia berasal dari eksport. GDP ini diperoleh dari perusahaan yang ada di Swedia yang cenderung

berorientasi pasar global. Hal ini juga membuat Swedia merujuk diri sebagai negara yang terbuka dan negara yang makmur. Didukung dengan prinsip ekonom Keynesian yang percaya bahwa kesuksesan dan inovasi dilahirkan dari keterbukaan dan kebebasan berpikir. Selanjutnya, dalam kehidupan bernegara, Swedia memiliki institusi yang saling seimbang dan terintegrasi serta melengkapi satu dan lainnya (Lundergen, 2016). Selain instansi pemerintahan, aktor dalam pemerintahan yakni Perdana menteri Swedia Stevan Löfven menunjukkan dukungan beliau dalam kebijakan luar negeri feminis. Hal ini tercermin dalam pidato beliau setelah terpilih sebagai perdana menteri. Beliau mengemukakan bahwa

“Sweden’s new government is a feminist government,. “We will fight gender roles and structures which hold people back. Women and men will be given equal power to shape our society and their own lives.” He promised to narrow the salary gap between women and men. “That’s why we will map salary trends every year. The employment rate should be equal for women and men.

Dalam pernyataan tersebut beliau menekankan bahwa kebijakan kesetaraan gender akan menjadi aspek penting dalam kabinetnya. Selain itu beliau menyatakan kabinetnya akan memperjuangkan kesetaraan gender dan memastikan kesenjangan gender dalam hal upah, kesempatan kerja dan perekonomian akan dihapuskan (Nordic Labour Journal, 2014). Dengan menganalisis ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan politik dan bernegara Swedia mendorong dan mendukung dibentuk dan dirumuskannya kebijakan luar negeri feminis. Nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan hak telah dijunjung tinggi Swedia dan menjadi budaya dan kultur dalam praktik bernegara. Dengan nilai-nilai demokrasi dan etika Luteran yang dianut oleh Swedia akan mempermudah jalannya pembentukan kebijakan luar negeri feminis mengingat nilai-nilai kesetaraan gender yang diilhami oleh feminisme dengan mudah dapat terwujud. Dukungan aspek historis seperti nilai *Lagom* yang berarti kesederhanaan yang berarti kesamaan kedudukan sehingga kebijakan luar negeri feminis merupakan nilai dari internal bernegara Swedia yang diproyeksikan kedalam kebijakan luar negeri sebagai upaya mewujudkan perdamaian.

Unit Level Analisis Sistem

Level analisis sistem fokus terhadap dorongan eksternal yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri. Pendekatan yang digunakan dalam level ini berbentuk pendekatan dari atas ke bawah (*top-down policy*) yang mana untuk merumuskan sebuah kebijakan dengan menganalisis kembali aspek sosial-ekonomi-politik dan geografis dari suatu negara serta sistem yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, pengaruh organisasi internasional yang dimana negara sebagai anggotanya terkhusus Swedia yang akan disoroti, termasuk dalam bagian pengaruh dorongan dalam pengesahan kebijakan luar negeri feminis Swedia. Secara khusus, terdapat dua IGO yang disorot dalam memberi pengaruh terhadap Swedia sendiri yakni PBB dan Uni Eropa.

Organisasi pertama yang akan ditelaah pengaruh dan dorongannya ialah PBB. Dewasa ini pengaruh PBB untuk Swedia berada pada level yang cukup signifikan. Sejak tahun 2015 dengan diluncurkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh Swedia sebagai negara anggota PBB. Pengadopsian SDGs kedalam kebijakan nasional disini sangat disoroti, terlebih Swedia adalah salah satu negara dengan upaya penerapan SDGs paling optimal dan promotor SDGs yang sangat masif. Terbukti dengan upaya pemerintah Swedia dengan mengundang *stakeholder* terkait dalam melakukan konsultasi-konsultasi mengenai penerapan

SDG di negara ini. Bahkan mengutip pernyataan pidato pembuka pada acara *SDGs kick off Event* pada tahun 2016 oleh Perdana Menteri Swedia pada tahun 2016, dimana Stevan Löfven menyatakan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk menerapkan SDGs untuk masa depan generasi penerus. Pernyataan ini berarti bahwa tanggung jawab dalam menerapkan SDGs bukan hanya tanggung jawab moral melainkan finansial juga dilibatkan dalam menerapkan kebijakan tersebut. (Bexell, 2016)

Komitmen lain PBB yang dapat dilihat dalam upaya penegakan kesetaraan gender ialah dengan mencantumkan kesetaraan gender dalam salah satu dari tujuh belas poin SDGs dimana kesetaraan gender terletak pada poin SDGs nomor lima. Menempatkan kesetaraan gender dalam poin ke lima dari tujuh belas poin merupakan bukti komitmen PBB terhadap isu yang merupakan kategori skala prioritas dan untuk dilaksanakan. Selain itu, PBB juga gencar dalam melakukan promosi terhadap nilai kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dari pidato-pidato pemimpin PBB yakni sekretaris jenderal PBB Ban Ki Moon. Pada pidato beliau yang ia kemukakan dalam memperingati acara *UN Commemoration of International Women's Day 2014* atau Hari Peringatan Perempuan Dunia, beliau menyampaikan bahwa kesetaraan gender dan penguatan terhadap perempuan merupakan prioritas utama beliau sebagai seorang sekretaris jenderal dan akan memastikan bahwa PBB akan selalu menaruh perhatian dan prioritas terhadap hal tersebut. Adapun pernyataan beliau bahwa yakni

“Gender equality and women’s empowerment have been a top priority for me from day one. And I am committed to making sure that the UN walks the talk.... Next year is also the deadline for our work to craft the post-2015 agenda and sustainable development goals. Women’s rights, women’s empowerment and gender equality are essential components of this conversation – including fundamental sexual and reproductive rights and ending violence against women... Take the message forward in your homes, your workplaces, your schools, and your communities: Where men and women have equal rights, societies prosper. As we celebrate International Women’s Day, let us recommit to equality and empowerment in all that we do. Equality for women is progress for all.”

Dalam pidato tersebut Ban Ki Moon juga menekankan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang patut diperjuangkan dan akan menjadi salah satu dari sekian prioritas yang akan dirumuskan dalam agenda SDGs tahun 2015. Pidatonya juga berisi hal mengenai upaya yang akan dilakukan dalam menegakkan kesetaraan gender dan menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hak perempuan merupakan komitmen yang harus dicapai dan beliau menekankan bahwa dimana hak perempuan dan laki-laki setara, maka masyarakat akan sejahtera (Ban Ki Moon, 2014).

Selain PBB, adapun organisasi lain yang membawa pengaruh untuk Swedia dalam merumuskan kebijakan luar negeri ialah Uni Eropa. Sebagai negara anggota Uni Eropa sejak tahun 1995, keputusan para petinggi Partai Sosial Demokrat Swedia untuk menggabungkan diri dalam organisasi regional yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan domestik Swedia. Selama hampir lebih dari dua puluh lima tahun bergabung sebagai negara anggota Uni Eropa dengan sejarah kekuatan yang cukup diperhitungkan dalam Uni Eropa. Dampak yang ditunjukkan Uni Eropa terhadap Swedia dalam ranah domestik memang cukup signifikan, terlebih urusan finansial dan perpajakan Swedia yang bisa diambil alih oleh Uni Eropa dalam beberapa sektor tanpa harus mendapatkan izin dari otoritas pemerintah lokal setempat (Lidström, 2018). Selain itu, Uni Eropa sebagai organisasi regional pun turut mewujudkan komitmen dalam

kesetaraan gender tidak hanya melalui promosi nilai-nilai demokrasi namun pembentukan institusi berbasis kesetaraan gender. Hal ini bermula pada tahun 1999 dimana untuk pertama kalinya Swedia secara eksplisit mengemukakan gagasan untuk mendirikan sebuah komisi atau instusi pusat untuk isu-isu yang berkaitan dengan masalah kesetaraan gender. Kemudian pada saat yang bersamaan Uni Eropa sedang mengalami proses dan cakupan kerja sebagai sebuah organisasi regional yang mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan struktural di Eropa sendiri. Hal ini mendorong kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam dalam bagian Uni Eropa. Setelah melalui perjalanan panjang dari gagasan permintaan Swedia mengenai institusi gender mandiri dibawah Uni Eropa pada tahun 2000 menyetujui pembentukan institusi gender untuk Uni Eropa dan disahkan pembentukannya pada tahun 2004. Setelah dilakukan berbagai perundingan maka pada tahun 2005 resmiah dibentuk *European Institute for Gender Equality* pada tahun 2005. Badan yang berada dibawah *European Union Commission* ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan 10 tahun Konferensi Perempuan di Beijing (Hubert, 2015). Pembentukan institusi ini merupakan bentuk nyata Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaruh perhatian dan berkomitmen dalam melakukan upaya penegakan kesetaraan gender. Dengan demikian, dapat dilihat jelas komitmen Uni Eropa untuk menerapkan kawasan yang berkesetaraan gender dengan mendirikan sebuah institusi yang berbasis riset,data yang ditujukan untuk menciptakan kawasan regional yang ramah terhadap kesetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan Uni Eropa yang lebih baik.

KESIMPULAN

Dari ketiga level analisis diatas yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yakni mengapa Swedia memilih kebijakan luar negeri feminis dikarenakan menteri luar negeri Swedia Margot Wallström, bertindak untuk merumuskan kebijakan luar negeri feminis merupakan keputusan yang didorong oleh cita-cita dan kultur Swedia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Dikarenakan kebijakan luar negeri ialah cerminan politik domestik yang dilakukan di internasional, maka kebijakan luar negeri feminis Swedia merupakan produk domestik Swedia sebagai negara yang didorong oleh ketiga aktor yang mendukung Swedia baik dari sisi individu yakni pemimpin, kemudian kultur politik dan negara Swedia, serta sistem internasional yang dekat dan memiliki pengaruh terhadap Swedia. Dengan demikian kebijakan ini dirumuskan Swedia sebagai bentuk perwujudan cita-cita domestik Swedia sebagai negara dan didukung oleh individu (pemimpin) yang berani mendorong dirumuskannya kebijakan luar negeri feminis ini.

REFERENSI

- Aggestam, K, A. B.-R. (2016) *Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: Ethics, Politics, and Gender*, *Ethics & International Affairs*. Vol 30(No 03), 323–334.
- Aggestam, K, A. B.-R. (2019). *Re-politicising the Gender-Security Nexus: Sweden's Feminist Foreign Policy*, *European Review of International Studies*. Vol 5, 31–45.
- AWPC, I. (2015.). *State University Archives of Women Political Communication (Margot Wallstrom)*.September 2015, dilihat 27 Juli 2020 diakses online : <https://awpc.cattcenter.iastate.edu/directory/margot-wallstrom/>
- Ban Ki Moon, 2014 Speech On UN Commemoration of IWD 2014: Speech by UN Secretary General [Online] 7 Maret 2014, UN Women [dilihat pada 07 Oktober 2020] diakses dari <<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/3/secretary-general-iwd-speech>>

- Bexell, M. (2016). Swedish Responsibility and The United Nations Sustainable Development Goals, Stockholm diakses dari www.eba.se
- Carl Bildt. (2013). Statement of Government Policy in the Parliamentary Debate on Foreign Affairs,” Government Offices of Sweden., February 13, 2013, p. 10, http://www.government.se/content/1_c6/20/90/55/6b351368.pdf
- Council of Women World Leaders, 2014 , Margot Wallstrom Biography, dilihat 02 Agustus 2020 diakses online : <http://www.councilwomenworldleaders.org/margot-wallstromlm.html>
- Freedom House,2014 , *Sweden* , The Freedom House Organization, Washington D.C diakses online :https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_Demo_Reports_Sweden_final.pdf
- House, F. (2014). Sweden , The Freedom House Organization, Washington D.C. Diakses online : <http://www.councilwomenworldleaders.org/margot-wallstromlm.html>
- Hubert, A. M. S. (2015). The European Institute for Gender Equality : A window of opportunity for gender equality policies?’, *European Journal of Women’s Studies*. Vol 18(No 2), 170–180.
- Lidström, A. (2018). Subnational Sweden, the national state and the EU, *Regional & Federal Studies*,. <https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1500907>
- Lundergen, K. (2016). Culture, institutions and long term development : the Swedish case and implications for China, *Journal of Chinese economic and Business Studies*. Vol 14(No 1), 2016.
- Ministry Of Foreign Affair (2017), *Sweden feminist foreign policy examples from three years of implementation*,dilihat 14 Mei 2020, diakses dari : <https://www.government.se/4ab455/contentassets/654bcc72d8f44da087386b4906043521/swedens-feminist-foreign-policy--examples-from-three-years-of-implementation.pdf>
- Noel, B. (2013). Resolving the dilemma between equality and liberty : the Swedish political system. *Eastern Journal of european studies*. Vol 4, 25–40.
- Poblete, S. 2018. (2018). Feminist Foreign Policy How can a feminist approach to foreign policy be understood? *Journal of Lund University Department of Political Science Peace- and Conflict Studies*, 12–14.
- Rourke, John (2007), *International Politics on The World Stages*, McGraw-Hill, New York.
- Sörbom, H. (2018). The World’s First Feminist Foreign Policy: Four Years Later An evaluation of Sweden’s feminist foreign policy 2014-2018. Hannah’, *Journal of Lund University Department of Political Science*, 1–15.
- Sverigesradio. (2017). Foreign Minister takes up #metoo campaign Oktober 2017 diakses online : <https://sverigesradio.se/artikel/6801363>
- The New York Times, 2017, Sweden’s Proponent of Feminist Foreign Policy, Shaped by Abuse, November,2017 diakses online : <https://www.nytimes.com/2017/11/17/world/europe/margot-wallstrom-sweden.html>
- Uimonen, P (2019): #MeToo in Sweden: Museum Collections, Digital Archiving and Hashtag Visuality, *Ethnos*, DOI: 10.1080/00141844.2019.1640264
- Wallström,M.2014 *Speech by the Minister for Foreign Affairs Margot Wallström at the seminar about #femdefenders, arranged by Kvinna till Kvinna* [Online] 28 November 2014, Government of Swedia diakses dari: <https://www.government.se/speeches/2014/11/speech-by-the-minister-for-foreign-affairs-margot-wallstrom-at-the-seminar-about-femdefenders-arranged-by-kvinna-till-kvinna/>

- Wallström, M. (2015). Speech in the UN Security Council : “Protection of Civilians in armed Conflict. Government of Swedia. <https://www.government.se/speeches/2015/01/speech-in-the-un-security-council-protection-of-civilians-in-armed-conflict/> [Online] 30 Januari 2015, Government of Swedia diakses dari : <https://www.government.se/speeches/2015/01/speech-in-the-un-security-council-protection-of-civilians-in-armed-conflict/>
- Wallström, M. (2016). Speech on Sweden’s Feminist Foreign Policy by Foreign Minister Margot Wallström at IHEC in Carthage, Tunis [Online] 28 October 2016 diakses dari <https://www.government.se/speeches/2016/10/speech-on-swedens-feminist-foreign-policy-by-foreign-minister-margot-wallstrom-at-ihec-in-carthage-tunis/>